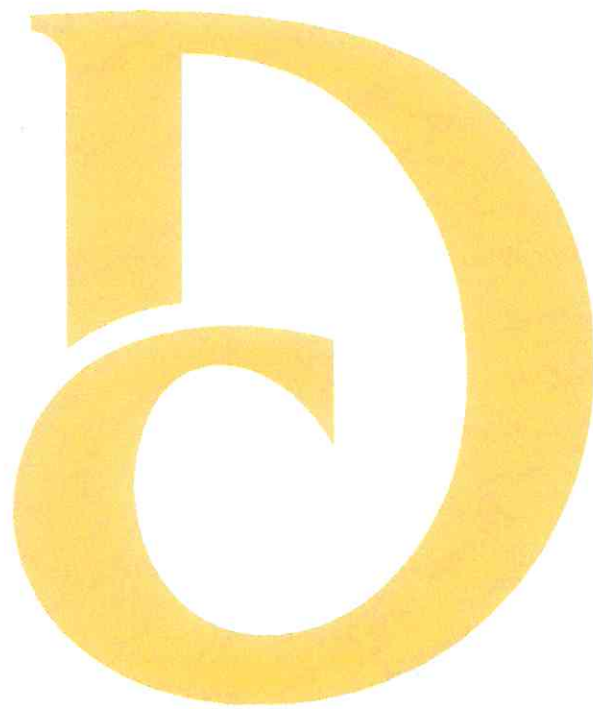


**LAPORAN PENERAPAN  
TATA KELOLA**



**PT. BPR DANA KARYA NUSA  
TAHUN 2025**





- b. PT. BPR Dana Karya Nusa berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan pelaksanaan GCG sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Dana Karya Nusa dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memiliki daya saing tinggi.
- c. PT. BPR Dana Karya Nusa juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Dana Karya Nusa sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten keberadaan BPR.

#### 4. PRINSIP-PRINSIP YANG DITERAPKAN OLEH PT. BPR DANA KARYA NUSA

Sebagai Lembaga jasa keuangan yang menjadi kepercayaan masyarakat PT. BPR Dana Karya Nusa dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu: keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness).

##### ➤ Keterbukaan (Transparency)

- Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

##### ➤ Akuntabilitas (Accountability)

- Bank harus menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing sumberdaya manusia yang ada dalam perusahaan sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha dan tujuan perusahaan.
- Pertanggungjawaban (responsibility)
- Sebagai wujud pertanggungjawaban bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berprinsip pada prinsip kehati-hatian.
- Bank harus bertindak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### ➤ Independensi (Independency)

- Pengelola bank secara professional tanpa pengaruh tekanan dari pihak manapun.



- Bank menghindari terjadi dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders.
- Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan pihak manapun.

➤ Kewajaran (Fairness)

- Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment)
- Bank harus memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

**5. PRINSIP PENERAPAN GCG DI PT. BPR DANA KARYA NUSA**

**II. STRUKTUR TATA KEKOLA PT. BPR DANA KARYA NUSA**

Struktur Tata Kelola Perusahaan PT. BPR Dana Karya Nusa telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Perekonomian Rakyat. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan perihal Asset dan Modal Inti BPR dalam Penerapan GCG di BPR, maka dapat disampaikan data Per 31 Desember 2025, posisi asset PT. BPR Dana Karya Nusa yang beralamat di Jalan Bypass Ir Soekarno Banjar Anyar Kediri Tabanan Bali sebesar Rp. 50.595.142.940,- dengan Modal Inti sebesar Rp. 11.005.832.961,82,- Adapun struktur tata kelola PT. BPR Dana Karya Nusa Berdasarkan asset dan modal inti dapat dijabarkan sebagai berikut :

**1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. BPR DANA KARYA NUSA**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Eko Budi Handoyo
	Jabatan : Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Jabatan direktur utama ymf kepatuhan bertanggung jawab atas kepengurusan BPR, mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab, wajib menerapkan tata kelola, menindaklanjuti temuan audit, memastikan terpenuhinya sdm yang memadai, mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam rups, mengungkapkan kebijakan bpr yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, bertanggungjawab kepada rups dan pemegang saham dalam hal mencapai tujuan dan tindakan yang dijalankan pada bank, mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan dalam segala kejadian,



	<p>bertanggungjawab dalam kegiatan bank secara keseluruhan, termasuk SDM dan sebagai direktur kepatuhan menjalankan fungsinya dengan batasan yang sudah ditentukan oleh POJK Tata Kelola yang baru, mengambil keputusan, merencanakan dan menetapkan program kerja, mewakili perusahaan dalam hubungan dengan instansi lain, secara periodik memimpin rapat. Tugas dan tanggung jawab direksi ymf kepatuhan, menetapkan langkah untuk memastikan bpr telah memenuhi seluruh peraturan ojk dan perundang undangan, memantau dan menjaga agar tidak menyimpang dari peraturan, memantau dan menjaga kepatuhan bpr, melaporkan tugas dan tanggung secara berkala kepada komisaris, melakukan rapat Direksi minimal 3 kali setahun, Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bertanggung Jawab Membidangi tugas-tugas di Bidang SDM dan Semua diluar pengambilan keputusan operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lainnya.</p>
2.	<p>Nama : I Nengah Suarta,S.S</p> <p>Jabatan : Direktur Bisnis</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>2. Jabatan direktur, bertanggung jawab atas kepengurusan BPR, mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR, menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR, menindaklanjuti temuan audit, memastikan terpenuhi Sumber Daya Manusia, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS, mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dekom dan Pemegang Saham. Sebagai direktur bisnis bertanggung jawab terhadap tercapainya target RBB terutama target kredit dan Laba sehingga target kredit tercapai sesuai komitmen dalam RBB dan kualitas kredit tetap terjaga lancar, menjaga Likuiditas BPR tetap terjaga dan aman. Memastikan dan menjaga pos-pos keuangan utama BPR dalam kondisi sehat dan TKS BPR selalu dalam keadaan Sehat, melakukan rapat direksi minimal dalam 3 kali setahun,sesuai dengan POJK Tata Kelola yang baru menangani Operasional, Kredit, Dana Dan Operasional Lainnya, Direktur Bisnis Bertanggung Jawab Membidangi tugas-tugas di Bidang Bisnis pada kegiatan operasional penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan</p>







	pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap prinsip apu ppt dan/atau pppspm, menyetujui kebijakan perkreditan bpr, menyetujui rencana kredit tahunan, melaporkan hasil pengawasan terhadap penerapan pedoman kebijakan perkreditan bpr kepada ojk, menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja setiap akhir semester yang dilaporkan kepada ojk, membuat pedoman tata tertib kerja serta tata tertib rapat, menyediakan waktu yang cukup kepada bank, melaksanakan tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup fungsi dewan komisaris
--	--

**3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite
	BPR tidak memiliki komite

**4. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Komite**

No	Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite
	BPR tidak memiliki komite

**5. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Anggota Komite
	BPR tidak memiliki komite

**6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR
	Direksi tidak memiliki saham di BPR

**7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.
	Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain





**13. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada BPR**

No	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
	Dewan Komisaris tidak memiliki saham di BPR

**14. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.
	Dewan Komisaris tidak memiliki saham di perusahaan lain

**15. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisari Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	I Ketut Sudarsa	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	Agung Sugiarto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**16. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	I Ketut Sudarsa	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	Agung Sugiarto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**17. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)



1.	Gaji	2	457.275.456	2	207.785.480
2.	Tunjangan	2	108.107.264	2	35.620.652
	Tantiem	2	61.911.052	2	35.517.988
	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>627.293.772</b>		<b>278.924.120</b>
Paket/kebijakan remunerasi bagi direksi dan dewan komisaris PT BPR Dana Karya Nusa ditetapkan berdasarkan RUPS					

#### 18. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas, BBM, Service, Asuransi allrisk/1 unit (untuk direktur utama), Mobil Dinas (sewa untuk direktur), BBM	tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan/2 unit, BPJS Ketenagakerjaan /2 unit	BPJS Kesehatan/2 unit, BPJS Ketenagakerjaan /2 unit
4.	Fasilitas lainnya	Asuransi pensiun (DPLK)/2 unit, Tunjangan pajak PPH21/2 unit, Biaya perjalanan dinas/perdiem	Asuransi pensiun (DPLK)/2 unit, Tunjangan pajak PPH21/2 unit, Biaya perjalanan

	(BPD)/2 unit, cuti tahunan/2 unit	dinas/perdiem (BPD)/2 unit, cuti tahunan/2 unit
Sudah berdasarkan RUPS		

### 19. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,80	
2.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,02	
3.	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	
4.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,28	
5.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,38	
<p>Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau ketentuan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan selama 1 tahun</p>			

## 20. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/materi Pembahasan
1.	14-01-2025	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2025, Realisasi dan Evaluasi RBB Tahun 2024;</li> <li>2. Isu-isu strategis BPR,</li> <li>3. Penerapan APU PPT PPPSPM;</li> <li>4. Pengelolaan SDM;</li> <li>5. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko,</li> <li>6. Penyelenggaraan Tehnologi Informasi.</li> </ol>
2.	08-04-2025	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi RBB dan Evaluasi RBB Triwulan 1 Th 2025;</li> <li>2. Isu-isu strategis BPR;</li> <li>3. Penerapan APU PPT PPPSPM;</li> <li>4. Pengelolaan SDM;</li> <li>5. Penerapan Tata Kelola;</li> <li>6. Penyelenggaraan Tehnologi Informasi.</li> </ol>
3.	25-07-2025	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi RBB dan Evaluasi RBB Triwulan 2 Th 2025;</li> <li>2. Isu-isu strategis BPR;</li> <li>3. Penerapan APU PPT PPPSPM;</li> <li>4. Pengelolaan SDM;</li> <li>5. Penerapan Tata Kelola;</li> <li>6. Penyelenggaraan Tehnologi Informasi.</li> </ol>
4.	08-10-2025	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan RBB Tahun 2026;</li> <li>2. Isu-isu strategis BPR;</li> </ol>

			3. Penerapan APU PPT PPPSPM; 4. Pengelolaan SDM; 5. Penerapan Tata Kelola; 6. Penyelenggaraan Teknologi Informasi.
Pelaksanaan rapat di tahun 2025			

**21. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekomunikasi	
1.	I Ketur Sudarsa	4	0	100.00
2.	Agung Sugiarto	3	1	100.00
<b>Kehadiran Anggota Dewan Komisaris 100%</b>				

**22. Jumlah penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

Jumlah penyimpangan internal (internal fraud) tahun 2025 NIHIL
--

**23. Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Permasalahan hukum yang dihadapi PT BPR Dana Karya Nusa NIHIL (tidak ada permasalahan hukum baik perdata atau pidana)
---

## 24. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	I Nengah Suarta, S.S	Direktur	Eko Budi Handoyo	Direktur Utama	Sewa Mobil	42.000.000	untuk penggunaan mobil operasional direktur bisnis

## 25. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

### III. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,70	0,20	1,49	0.298	Jumlah anggota direksi sudah sesuai ketentuan BPR dengan modal inti kurang dari lima puluh milyar rupiah. Salah satu direksi adalah direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seluruh anggota direksi telah lulus uji kemampuan, tugas dan tanggung jawab

							dilakukan dengan baik
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,80	0,20	1,78	0.267	Sudah sesuai ketentuan dengan jumlah anggota dewan komisaris 2 orang. Anggota komisaris PT BPR Dana Karya Nusa sudah lulus uji kemampuan dan melakukan tugas tanggung jawab sesuai ketentuan
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0.000	Modal inti kurang dari 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) belum memiliki komite
Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR sudah memiliki SOP benturan kepentingan
Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Salah satu direksi adalah direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan sudah ada Pejabat eksekutif yang menanganani fungsi kepatuhan
Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,90	0,20	2,10	0.210	Penerapan fungsi audit intern sudah dilakukan oleh pejabat eksekutif yang menanganani fungsi audit

Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Sudah dilaksanakan
Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Tidak terdapat pelanggaran BMPK sampai dengan bulan desember 2024
Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana bisnis bank di tahun 2024 sudah disetujui oleh dewan komisaris dan disupport oleh pemegang saham
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Bank menyampaikan informasi secara transparan dan saat ini corebanking system BPR sudah berbentuk IBS sehingga laporan bersifat tepat dan realtime

#### IV. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment Tata Kelola Bagi BPR (Good Corporate Governance)* posisi akhir Desember 2025, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment Good Corporate Governance* sebagai berikut:



Dengan ini PT BPR Dana Karya Nusa berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik yang senantiasa menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

Tabanan, 22 April 2026

PT BPR DANA KARYA NUSA



**I Ketut Sudarsa**  
Komisaris Utama

BANK DANA KARYA  
PT BPR Dana Karya Nusa  
ꦧꦫꦥꦫꦺꦤꦏꦂꦪꦏꦂꦪꦤꦸꦱ



**Eko Budi Handoyo**  
Direktur Utama YMF Kepatuhan

